



CATATAN AKHIR TAHUN 2024 & PROYEKSI 2025

BENCANA EKSTRAKTIVISME YANG TERORGANISIR DI MALUKU UTARA



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK
SIMPUL MALUKU UTARA

2024

CATATAN AKHIR TAHUN 2024 & PROYEKSI 2025

BENCANA EKSTRAKTIVISME YANG TERORGANISIR DI MALUKU UTARA

TIM PENYUSUN:

Julfikar Sangaji
Nurkholis Hamid
Teguh Purnomo
Dini Pramita

PENYUNTING:

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK
SIMPUL MALUKU UTARA

2024



DAFTAR ISI

Pengantar | 1

Pusaran Korupsi Sumber Daya Alam | 4

Bencana Nikel | 13

Warga Melawan Mesin Tambang | 19

Proyeksi Bencana Akibat Politik Elektoral Maluku Utara 2025 | 24

Jejak Bisnis Ekstraktif Sherly Tjoanda | 28

Sikap Simpul JATAM Malut | 35





I. Pengantar

Lipat Ganda Daya Rusak

Tahun 2024 menjadi momen paling memilukan bagi Maluku Utara, terutama warga yang hidup di wilayah lingkaran tambang. Selain terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari cengkeraman negara – korporasi, desa-desa tempat mereka hidup tak luput dari dampak aktivitas ekstraktif. Mulai dari banjir, kerusakan sungai, pesisir, hingga lautan yang kemudian mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari.

Persoalan kemudian melebar pada kasus tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam. Sejumlah pejabat, politikus, hingga pengusaha tambang ikut terseret. Sederet peristiwa krusial itu kemudian ditutup dengan basa-basi pemilihan kepala daerah yang beberapa di antaranya memiliki kepentingan langsung atas industri ekstraktif.

Kelimpahan sumber daya alam berupa nikel, emas, bijih besi, pasir besi, batu gamping, hingga panas bumi (geotermal) yang terdapat hampir di sekujur tubuh Pulau Halmahera, menjelma menjadi kutukan karena adanya kelindan kepentingan oleh penguasa, baik di level daerah maupun pusat. Atas nama pertumbuhan ekonomi, para pejabat *cum* pebisnis mengeksploitasi dan meraup cuan sebanyak–banyaknya. Lalu pergi meninggalkan kubangan krisis yang tak terpulihkan.

Halmahera, pulau terbesar di Kepulauan Maluku harus menanggung beban ekonomi ekstraktivisme, akibat dari ambisi dan ketamakan para pengurus negara yang sebagian di antaranya ikut berbisnis tambang. Pulau Halmahera yang tersohor akan rempah serta keanekaragaman hayati, kini dibangkrutkan oleh tambang demi melayani kerakusan pebisnis *cum* pejabat nasional hingga global.

Selain daratan luas, pulau-pulau kecil lainnya juga tak luput untuk dikorbankan. Mulai dari Pulau Pakal, Gee, dan Mabuli di Halmahera Timur. Berlanjut ke Pulau Gebe dan Fau di Halmahera Tengah, Pulau Obi dan Mala-Mala di Halmahera Selatan. Kemudian Pulau Mangoli di Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu. Beberapa pulau di antaranya sudah sekarat, sedangkan yang lainnya terus diobrak-abrik.

Perusakan terhadap pulau-pulau itu dipaksakan oleh pengurus negara untuk melayani kepentingan segelintir orang. Saat ini saja, seluruh daratan Maluku Utara dibebani 127 izin usaha pertambangan. Kebijakan gelap mata ini kemudian mendorong percepatan krisis sosial-ekologis, yang sama artinya dengan mengundang petaka.

Memasuki 2025, roda pemerintahan Indonesia dikendalikan oleh kekuasaan Prabowo-Gibran yang berada dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Gerbong politik super gemuk yang nyaris tanpa menyisakan oposisi ini, mengkonfirmasi sebuah situasi yang lebih memilukan dari rangkaian peristiwa sepanjang 2024. Sebab, nyaris semua partai politik bergabung. Bisa dipastikan, satu-satunya oposisi saat ini hanya kekuatan rakyat.

Sementara itu, hampir semua kandidat yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota diusung oleh partai-partai politik yang berafiliasi langsung dengan KIM Plus. Artinya, mereka akan bertindak sebagai operator di tingkat daerah yang nantinya melayani agenda nasional. Satu di antaranya adalah melanjutkan hilirisasi nikel – dalang dari semua krisis ruang hidup warga.¹

Laporan ini disusun menggunakan pelbagai data dan dokumen dari sumber yang terbuka atau *open source*, dengan mengakses laporan media massa, laporan warga, laporan penelitian sebelumnya, catatan lapangan, dan pelbagai dokumen yang relevan serta tersedia untuk diakses publik. Adapun pengumpulan data dan penulisan laporan ini dilaksanakan sepanjang 1-13 Desember 2024.

¹ <https://jatam.org/id/lengkap/Pilkada-membawa-petaka>



II. Pusaran Korupsi Sumber Daya Alam

Kekuasaan Abdul Gani Kasuba (AGK) pada periode kedua tak berakhir mulus. Di penghujung jabatannya, politikus PDIP itu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Penangkapan itu terkait dengan tindak pidana korupsi yang mengarah pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

Rasuah bekas Gubernur Maluku Utara dua periode itu ikut menyeret sejumlah pihak. Mulai dari birokrat negara, aktor tambang, hingga politikus jelmaan makelar tambang. Belakangan, muncul nama dari anak dan menantu Presiden Joko Widodo, yaitu Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, yang pada akhirnya nama ini kembali tenggelam dalam sidang-sidang selanjutnya.²

Kasus rasuah yang dijalankan oleh AGK dengan melibatkan pejabat paling elit di negara ini beserta gerbong para pebisnis tambang, merupakan praktik perdagangan politik dan kekuasaan dalam bentuk klientelisme (patronisme) yang paling kentara. Di tangan para elite inilah, politik dan kekuasaan menjadi serupa komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan paling maksimal dari pengerukan sumber daya alam besar-besaran.

² <https://jatam.org/id/lengkap/Kepentingan-Istana-Partai-Politik-dalam-Kasus-Korupsi-Nikel-Malut>

Klientelisme merupakan praktik perdagangan kekuasaan eksploitatif dan koruptif yang melibatkan patron sebagai pihak yang lebih kaya (pebisnis/pemodal) dengan klien sebagai pihak yang lebih lemah. Dimensi korupsi dalam praktik ini terbaca ketika pejabat yang terpilih mendistribusikan sumber daya secara tidak adil sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan oleh patron dalam pemilu.³

Gelagat patronase ini dapat ditelusuri dari politik pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan AGK semasa masih menjabat sebagai gubernur. Di pengujung jabatan di periode pertama, tepatnya pada 2018, ia mengobrol banyak izin tambang. Saat kembali mencalonkan diri dalam pilkada 2019, ia terpilih. Belakangan terbukti bahwa AGK bertindak koruptif dengan memanfaatkan kuasa sebagai gubernur.

Dengan kehadiran elite politik nasional yang beberapa di antaranya merupakan pejabat negara cum pebisnis tambang dalam pusaran korupsi AGK, menunjukkan adanya praktik korupsi yang lebih serius berupa korupsi yang difasilitasi negara (*state capture corruption*).⁴ Ini ditunjukkan dari besarnya pengaruh kepentingan sektor bisnis dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan negara demi keuntungan mereka sendiri. Dalam skema ini, AGK hanya menjadi operator.

3 <https://www.u4.no/terms#systemic-corruption>, lihat: *clientelism*.

4 <https://www.u4.no/terms#systemic-corruption>, lihat: *state capture*

Gejala ini ditunjukkan setelah periode kedua pemerintahan AGK. Paska terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, AGK sebagai kepala daerah hanya bertugas sebagai operator. Negara berhasil mengakomodir kepentingan pemodal besar-besaran melalui lahirnya UUCK. Praktis tugas AGK hanya memastikan operasi tambang elite nasional berjalan mulus, salah satu yang terungkap dalam persidangan adalah 'Blok Medan' yang diduga milik anak dan menantu Jokowi.

Apabila merujuk buku, "Karakteristik dan Pertanggungjawaban Hukum Oligark dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam", praktik korupsi AGK dapat diklasifikasikan sebagai bentuk bisnis-politik. Kondisi ini menunjukkan adanya relasi yang kompleks antara kepentingan ekonomi dengan kekuasaan politik, yang dijalankan oleh politikus atau pejabat negara dengan pebisnis. Tujuan dari penciptaan relasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, baik uang maupun jabatan.⁵

Berikut fakta dan kejadian sepanjang proses sidang kasus tindak pidana korupsi yang menyeret AGK.

⁵ Safa'at, Rachmad, dkk, "Karakteristik dan Pertanggungjawaban Hukum Oligark dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam". *Inteligensia Media*, 2023, hal V

17 Juli 2024: KPK menetapkan Muhaimin Syarif (MS), bekas Ketua DPD Gerindra Maluku Utara sebagai tersangka. Penetapan MS terkait tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada AGK, bekas Gubernur Maluku Utara dua periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 menyangkut pengadaan barang dan jasa, serta pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.⁶

31 Juli 2024: Suryanto Andili selaku Kepala Dinas ESDM Maluku Utara yang dihadirkan sebagai saksi AGK, menyebut nama Bobby Nasution (menantu dari Joko Widodo, Presiden Indonesia ketujuh). Suryanto mengatakan AGK memberikan keistimewaan ke Blok Medan terkait usaha tambang nikel di Maluku Utara. Ihwal Blok Medan, masih pada sidang yang sama, Suryanto menyebut kalau terkait itu MS lebih tahu.

01 Agustus 2024: Dalam persidangan, AGK mengklarifikasi pernyataan Suryanto Andili. AGK menegaskan Blok Medan milik Kahiyang Ayu, istri Bobby Nasution (saat itu Wali Kota Medan, Sumatera Utara) yang berlokasi di Halmahera Timur, bergerak di bidang pertambangan nikel.

22 Agustus 2024: Setelah menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ternate, keluarga AGK yang berkumpul di dekat mobil tahanan berteriak, agar Bobby Nasution juga turut ditangkap dalam perkara suap izin tambang.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/19/10172781/tersangka-penyuap-eks-gubernur-maluku-utara-segera-diadili>

02 Oktober 2024: Sidang pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ternate, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa MS telah memberi suap kepada AGK sebesar Rp4,4 miliar. Selain itu MS disebut oleh JPU terlibat dalam pengurusan dan pengusulan 57 blok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara yang berlangsung selama 2021 hingga 2022.

Berikut 57 Blok WIUP yang diurus Muhaimin Syarif sepanjang 2021 hingga 2022:

13 WIUP Tahun 2021

No.	Perusahaan	Daerah/Kab.
1	PT Lipu Jaya Mineral.	Blok Foli, Halmahera Timur
2	PT Sejahtera Agung Sentosa Abadi.	Blok Soagimalaha, Halmahera Tengah
3	PT Sejahtera Agung Sentosa Abadi	Blok Subaim II, Halmahera Tengah
4	PT Molagina Persada Tambang	Blok Soagimalaha I, Halmahera Timur
5	PT Landarmil Gunung New World	Blok Samarake, Halmahera Timur
6	PT Baranusa Pratama	Blok Sosolat II, Halmahera Timur
7	PT Sowite Karya Utama	Blok Taliabu II, Pulau Taliabu
8	PT Molagina Prima Perkasa	Blok Taliabu III, Pulau Taliabu
9	PT Mineral Molagina Mandiri	Blok Taliabu I, Pulau Taliabu
10	PT Basma Halmahera Mineral	Blok Loloda Utara, Halmahera Utara
11	PT Adi Amando Jaya	Blok Jailolo, Halmahera Barat
12	PT Prisma Aditama Kreasindo	Blok Jailolo Selatan Utara, Halmahera Barat
13	PT Prisma Aditama Kreasindo	Blok Jailolo Selatan II, Halmahera Barat

44 WIUP Tahun 2022

No.	Perusahaan	Daerah/Kab.
1	PT Mineral Jaya Molagina	Blok Elfanun, Halmahera Tengah
2	PT Mineral Buana Nusantara	Blok Kawasi Selatan I, Halmahera Selatan
3	PT Mineral Buana Nusantara	Blok Kawasi Selatan II, Halmahera Selatan
4	PT Maogena Terobos Mining	Blok Kawasi, Halmahera Selatan
5	PT Wasile Jaya Lestari	Blok Lelilef Sawai, Halmahera Tengah
6	PT Lipu Jaya Mineral	Blok Marimoi I, Halmahera Timur
7	PT Lipu Jaya Mineral	Blok Pumlanga, Halmahera Selatan
8	PT Maogena Trobos Mining	Blok Soligi, Halmahera Selatan
9	PT Wasile Jaya Lestari	Blok Wailukum, Halmahera Timur
10	PT Pratama Siwalima Sentosa	Blok Bobo II, Halmahera Selatan
11	PT Mineral Bumi Malanga	Blok Damuli, Halmahera Tengah
12	PT Salawaku Mineral Abadi	Blok Fluk II, Halmahera Selatan
13	PT Mineral Bumi Malanga	Blok Foli I, Halmahera Timur
14	PT Salawaku Mineral Abadi	Blok Kaf, Halmahera Tengah
15	PT Pratama Siwalima Sentosa	Blok Obilatu, Halmahera Selatan
16	PT Salawaku Mineral Abadi	Blok Selatan Umera, Halmahera Timur
17	PT Pratama Siwalima Sentosa	Blok Tanjung Leleo Baso, Halmahera Selatan
18	PT Kadie Lipuku Mandiri	Blok Banemo di Halmahera Tengah
19	PT Adi Amando Jaya	Blok Loloda di Halmahera Barat
20	PT Basama Halmahera Gemilang	Blok Loloda II di Halmahera Barat
21	PT Citra Alam Indonesia	Blok Sahu Timur di Halmahera Barat
22	PT Prima Mitra Benua	Blok Baburino di Halmahera Timur

No.	Perusahaan	Daerah/Kab.
23	PT Sitasa Mining Company	Blok Baru II, Halmahera Selatan
24	PT Intyra Buana Selaras	Blok Bicoli II, Halmahera Tengah
25	PT Sitasa Mines	Blok Elfanun II, Halmahera Tengah
26	PT Sitasa Mines	Blok Soa Sangaji, Halmahera Timur
27	PT Bina Citra Sawita	Blok Sonof Kacepo, Halmahera Tengah
28	PT Sitasa Mines	Blok Elfanun II, Halmahera Tengah
29	PT Sitasa Mines	Blok Wayaloar, Halmahera Timur
30	PT Bukit Tambang Raya	Blok Tambang Raya, Halmahera Timur
31	PT Bukit Tambang Raya	Blok Leleba, Halmahera Timur
32	PT Hamparan Hasil Tambang	Blok Hamparan, Halmahera Tengah
33	PT Basalt Sukses Mining	Blok Waijo, Halmahera Timur
34	PT Sukses Jaya Mineral	Blok Buli Asal, Halmahera Timur
35	PT Nusa Padma Mining	Blok Geltoli, Halmahera Timur
36	PT Halmahera Pratama Energy	Blok Maba Sangaji, Halmahera Timur
37	Blok Taliabu Utara I	Pulau Taliabu
38	Blok Taliabu Utara II	Pulau Taliabu
39	Blok Taliabu Utara III	Pulau Taliabu
40	Blok Bicoli II	Blok Bicoli II di Halmahera Timur
41	PT Bumi Jaya Lestari	Blok Sakam di Halmahera Tengah
42	PT Halmahera Daya Nikel	Blok Fluk III di Halmahera Selatan
43	PT Tri Mineral Mining	Blok Bololo, Halmahera Timur
44	PT Halmahera Pratama Energy	Blok Wasile, Halmahera Timur

30 Oktober 2024: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Utara, Bambang P. Hermawan saat dalam persidangan MS di PN Ternate, mengaku mengurus usulan puluhan WIUP tak sesuai prosedur yang ia terima dari MS. Sedikitnya ada 80 WIUP yang diurus dan hanya 9 blok yang diproses.⁷

⁷ <https://haliyora.id/2024/10/31/terungkap-pemprov-maluku-utara-urus-9-blok-tambang-milik-muhaimin-syarif/2/>

- **03 Desember 2024:** Sidang pembacaan tuntutan, JPU KPK menuntut terdakwa MS 4 tahun penjara, serta dibebankan membayar denda senilai Rp200 juta dan subsider pidana pengganti lima bulan kurungan.
- **13 Desember 2024:** Dalam sidang di PN Ternate, terdakwa MS dalam kasus dugaan korupsi tambang di Maluku Utara, menyampaikan kesediaannya menjadi *whistleblower* untuk membantu KPK mengungkap skandal korupsi di wilayah Maluku Utara.





Foto AGK bagian kiri: Rifki Anwar/Halmaheranesia



© Doc Warga

III. Bencana Nikel

Teluk Weda

Aktivitas tambang nikel yang melibatkan land clearing telah membuat tutupan hutan berkurang secara drastis. Di Halmahera Tengah, misalnya, operasi tambang telah mendorong laju kehilangan tutupan hutan di wilayah itu. Global Forest Watch mencatat, sejak 2001 hingga 2023, Halmahera Tengah kehilangan 27,9 kilo hektare (kha) atau sekitar 27.900 hektare tutupan pohon, yang setara dengan penurunan 13% tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan pelepasan 22.4 Mt emisi CO₂e.⁸

Sementara itu, khusus pada bukaan lahan tambang milik PT Weda Bay Nickel, salah satu perusahaan pemegang konsesi nikel terbesar di atas Pulau Halmahera, tercatat sejak 2011 hingga 2024, kehilangan tutupan hutan sudah mencapai 6.474,46 hektare. Sedangkan untuk seluruh Halmahera Tengah, luas bukaan lahan untuk tambang mencapai 21.098,24 hektare.⁹

⁸ <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/18/3/>

⁹ Hasil overlay citra satelit dari website planet.com pada Juni 2024 dan data deforestasi dari Kementerian LHK tahun 2011-2022, diolah JATAM

Kehilangan tutupan hutan telah menjadi faktor pemicu utama datangnya bencana banjir bandang yang terus menghajar wilayah Halmahera Tengah. Tercatat sepanjang 2024, banjir di wilayah Teluk Weda sudah terjadi sebanyak lima kali. Banjir terparah pada 21 - 24 Agustus 2024. Dimana, air setinggi 1-3 meter menenggelamkan sejumlah desa di Halmahera Tengah yang membuat sekitar 1.670 warga dipaksa mengungsi. Desa-desa yang lumpuh akibat banjir meliputi Desa Lelilef Woebulen, Lukulamo, serta wilayah Transmigran Kobe yang mencakup Desa Woekob, Woejerana, dan Kulo Jaya di Kecamatan Weda Tengah.

Desa-desa yang dihajar banjir itu merupakan desa yang dikepung oleh industri tambang nikel, dua di antaranya PT Weda Bay Nickel dan kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) – sebuah raksasa pengolahan nikel yang beroperasi sejak 2018.¹⁰



¹⁰ <https://jatam.org/id/lengkap/Perampokan-Halmahera>

08 Maret 2024:

Banjir setinggi lutut orang dewasa menerjang Desa Lukulamo, Halmahera Tengah.

13 Juni 2024:

Banjir setinggi dada orang dewasa kembali menerjang Desa Lelilef Weobulan dan Desa Lukulamo, Halmahera Tengah.

17 Juni 2024:

Banjir setinggi satu meter menerjang Desa Gemaf, Halmahera Tengah.

21 - 24 Juli 2024:

Banjir setinggi 1 - 3 meter menerjang Desa Lelilef Woebulen, Lukulamo, Woekob, Woejerana, dan Kulo Jaya, Halmahera Tengah.

12 Agustus 2024:

Banjir menerjang Desa Lukulamo, Halmahera Tengah.

© Doc Warga

Selain di Teluk Weda, kondisi serupa terjadi di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Dua kali tanggul milik Harita Nickel diduga jebol, mengakibatkan air disertai lumpur pekat menyapu pemukiman warga Desa Kawasi. Bencana ekologis itu membuat warga panik hingga pada akhirnya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga, yang berada di dataran tinggi. Di perkampungan yang berada di dataran rendah, ketinggian air mencapai satu meter.

11 Juni 2024:

Tanggul milik Harita Nickel ditengarai jebol hingga membuat air dan lumpur pekat menyapu permukiman warga Kawasi. Ketinggian airnya mencapai satu meter.

05 Juli 2024:

Tanggul milik Harita Nickel diduga kembali jebol, mengakibatkan air meluap hingga masuk ke rumah warga.¹¹

¹¹ <https://www.fadulinews.com/tanggul-pt-hpal-anak-cabang-harita-group-jebolwarga-panik-di-lokasi-perusahaan/>

Selain itu, pendudukan hutan di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah oleh korporasi nikel menyertai operasinya yang semakin buas, telah membuat ruang hidup suku Tobelo Dalam atau *O'Hongana Manyawa* terhimpit. *O'Hongana Manyawa* adalah suku yang dalam corak kehidupan mereka masih menerapkan cara hidup nomaden dan sudah hidup beratus-ratus tahun di dalam hutan belantara Pulau Halmahera.

Dengan demikian, bagi mereka hutan merupakan rumah: tempat mereka tinggal, mencari makan, berburu hewan, tempat tumbuh, sampai beranak-pinak. Namun sayangnya, kehidupan mereka terus terusik dengan operasi tambang nikel yang didatangkan pengurus negara yang kini mengancam keberlanjutan hidup mereka.

23 Mei 2024: Sebuah video merekam tiga orang suku Tobelo Dalam menghampiri pekerja PT Weda Bay Nickel di pedalaman hutan Halmahera atau area Kaorahe. Ketiga orang suku tersebut ditengarai menyambangi lokasi camp karena kelaparan. Namun sebenarnya apa yang dilakukan oleh ketiga orang suku itu tak semata karena mereka itu lapar, tapi sebaliknya operasi tambang justru memasuki rumah mereka, memberangus hutan-hutan di mana mereka mencari makan.



**KAMI MENOLAK
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PT. GAMPING MINING INDONESIA & PT. KARUNIA SAGEA MINERAL
SUDAH CUKUP KERUSAKAN DAN BENCANA LINGKUNGAN YANG TERJADI,
KEBRUTALAN DAN KERAKUSAN PERUSAHAAN HARUS DIHENTIKAN**

Foto: Save Sagea

IV. Warga Melawan Mesin Tambang

Perjuangan warga dalam melawan mesin ekstraktivisme meletup dan membara di desa-desa. Perlawanan atas tambang itu seakan memberi pesan, bahwa kehadiran korporasi sebenarnya ditolak, tapi dipaksa masuk oleh pengurus negara. Berikut himpunan perlawanan warga di Maluku Utara sepanjang 2024 yang tercatat:

Desa Sagea & Kiya

- **02 Agustus 2024:** Warga Sagea, Halmahera Tengah, mengadakan utusan yang ditengarai ditugaskan untuk sosialisasi penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terkait rencana perusahaan memperluas kawasan industri pengolahan nikel PT IWIP.¹²
- **12 September 2024:** Warga Sagea menggeruduk kantor DPRD Halmahera Tengah di tengah suasana pelantikan 20 legislator. Warga mendesak DPRD mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan kawasan karst di Gua Boki Moruru dan daerah aliran sungai (DAS) Sagea.
- **16 September 2024:** Dalam gelar ritual adat Cokaiba, warga Sagea menyerukan penghentian aktivitas perusahaan batu gamping, PT Gamping Mining Indonesia dan PT Karunia Sagea Mineral. Sebab, perusahaan ini mengancam kelestarian ekosistem karst.

¹² <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7471658/warga-halteng-cegat-utusan-pt-iwip-sosialisasi-amdal-perluasan-tambang-nikel>

Desa Lokulamo

19 September 2024: Warga Desa Lokulamo, Halmahera Tengah, menggelar aksi menuntut PT IWIP dan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah, bertanggung jawab atas bencana banjir yang melanda wilayah.¹³

Desa Pekaulang

27 Juni 2024: Seorang petani di Desa Pekaulang, Maba, Halmahera Timur, menanam kembali empat bibit pohon kelapa yang digusur perusahaan tambang nikel PT Sambaki Tambang Sentosa. Ia tak terima lahan kebunnya dijarah perusahaan. Lahan kebunnya seluas empat hektare yang sudah ditanami 12.000 ubi kayu dan 1.000 batang sereh, ludes dibabat habis perusahaan.¹⁴

Desa Kawasi

5 Juni 2024: Sekitar 40 orang warga melakukan protes di area konsesi Harita Group di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan. Warga membentangkan spanduk dan menghadang kendaraan pengangkut ore nikel, serta meminta aktivitas penambangan dihentikan. Protes tersebut lantaran Harita Group ditengarai melakukan penyerobotan lahan milik warga.¹⁵

¹³ <https://www.mediacogoipa.online/2024/09/aksi-pemboikotan-warga-lokulamo-terkait.html>

¹⁴ <https://www.ceramat.co.id/protes-kebunnya-digusur-perusahaan-tambang-petani-di-haltim-tanam-pohon-kelapa/>

¹⁵ <https://witness.tempo.co/article/detail/8070/warga-menghadang-aktivitas-tambang-harita-group.html>

Desa Buli Karya

19 September 2024: Utusan perusahaan tambang nikel PT Priven Lestari terciduk menemui warga pemilik lahan secara diam-diam di Desa Buli Karya. Upaya bujuk-rayu ini diprotes warga, karena warga tetap menolak Pegunungan Wato Wato ditambang. Penolakan warga terhadap PT Priven Lestari didasari atas keterancaman kelestarian Pegunungan Wato Wato yang merupakan benteng terakhir, sekaligus sumber penghidupan warga. Sebab, di kaki gunung Wato Wato terdapat kebun yang sudah ditanami pelbagai tanaman produktif seperti kelapa, pala, cengkeh, dan nanas. Selain itu, pada pegunungan ini tersedia sembilan aliran sungai yang dimanfaatkan oleh puluhan ribu warga di Buli sebagai sumber air utama.

Desa Bicoli

15 April 2024: Warga di Desa Bicoli, Halmahera Timur, menolak aktivitas tambang nikel PT Berkarya Bersama Halmahera yang hendak bercokol. Warga waswas operasi tambang akan merusak hutan, kebun, hingga mencemari pesisir dan laut.

Desa Maba Sangaji

25 Januari 2024: Warga Maba Sangaji, Halmahera Timur, melakukan protes di depan kantor Bupati Halmahera Timur. Warga mendesak pemerintah dan DPRD memperhatikan dampak aktivitas pertambangan nikel yang telah merusak Sungai Maba Sangaji.¹⁶

¹⁶ <https://ternate.tribunnews.com/2024/01/25/warga-halmahera-timur-desak-pemkab-dan-dprd-perhatikan-lingkungan-hidup-dampak-operasi-tambang>

Patani Timur

22 Maret 2024: Warga Patani Timur, Halmahera Tengah, melakukan protes atas rencana kehadiran perusahaan tambang nikel PT Berkarya Bersama Halmahera dan Duta Halmahera Mining. Dasar protes itu karena mayoritas masyarakat Petani Timur bekerja sebagai petani kebun. Mereka menggantungkan hidup dari hasil komoditas seperti pala, cengkeh, dan kelapa. Ruang produksi itu akan hilang jika tambang hadir. Warga tidak mau persoalan yang dirasakan warga lingkaran tambang di beberapa wilayah, turut dialami warga Patani.¹⁷

Desa Mangoli

20 Februari 2024: Warga di Desa Mangoli, Mangoli Tengah, Kepulauan Sula, melakukan aksi protes atas 10 izin usaha pertambangan bijih besi yang bercokol di Pulau Mangoli. Warga minta perusahaan bijih besi itu segera dicabut pemerintah, karena mengancam sumber penghidupan dan ruang produksi warga.

Desa Kou

26 Agustus 2024: Warga di Desa Kou, Mangoli Timur, Kepulauan Sula, melakukan aksi protes terhadap 10 izin usaha pertambangan bijih besi yang bercokol di Pulau Mangoli. Warga menuntut izin perusahaan tambang itu dicabut pemerintah, sebab kehadiran perusahaan mengancam kebun-kebun warga.

¹⁷ <https://www.ceramat.co.id/hipma-patani-beri-penyadaran-ke-warga-atas-bahaya-industri-tambang/>

NEGARA MENGUSIR KAMI
DARI PULAU MANGOLI LEWAT
10 IUP

✘ CABUT IJIN PT. INDOMINERAL DI
DESA KOU

✘ CABUT 10 IUP DI PULAU
MANGOLI

✘ SAVE DESA KOU

© Doc Warga

KAWASAN KARST SAGEA
TIDAK UNTUK DITAMBANG

SEGERA TETAPKAN SAGEA SEBAGAI KAWASAN LINDUNG

© Save Sagea



V. Proyeksi Bencana Akibat Politik Elektoral Maluku Utara 2025

Gelanggang politik elektoral di Maluku Utara dalam merebut tampuk kekuasaan Gubernur dan Wakil Gubernur diikuti oleh empat pasangan calon. Dari seluruh pasangan calon, tidak ada kandidat independen, yang artinya semua diusung melalui koalisi partai politik.

Pada Minggu 08 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara resmi menetapkan pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai pemenang dalam pemilihan serentak 27 November 2024. Pasangan nomor urut empat itu memperoleh 359.416 suara atau 51.68 persen, mengungguli tiga pesaingnya.

Terpilihnya Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025 - 2030 yang didukung oleh Partai Nasdem, PPP, Demokrat, PKB, PAN, Gelora, Buruh, dan PSI, sesungguhnya membawa angin segar bagi kekuasaan Prabowo. Meskipun pasangan ini tak diusung Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo Subianto, tapi delapan partai pengarak itu berada dalam afiliasi politik KIM Plus, yang saat ini sebagian dari elitnya menjadi pembantu Prabowo.

Sebaris dengan iklim politik elektoral nasional, maka perjalanan kekuasaan politik Sherly dalam memimpin Maluku Utara, ditengarai akan bekerja dan melayani agenda pusat. Salah satu agenda prioritas pusat, yaitu melanjutkan hilirisasi nikel. Nikel masih menjadi komoditas primadona yang terus digenjot pemerintah, dan pelaksanaan program tersebut sudah aktif di Maluku Utara. Dengan demikian, program prioritas pemulihan lingkungan yang telah disampaikan Sherly, justru menjadi pepesan kosong.

Sherly, dalam debat kedua pada Selasa 19 November 2024 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), menekankan pentingnya menjadikan pelestarian lingkungan sebagai prioritas dalam kepemimpinannya jika terpilih. Ia lalu menyoroti sejumlah kerusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Weda, Halmahera Tengah dan Teluk Buli, Halmahera Timur sebagai akibat dari dampak aktivitas tambang nikel disertai pengelolaannya.

Apa yang dikatakan Sherly memang benar, bahwa potret krisis sosial-ekologis terhadap kedua teluk itu dipicu oleh tambang serta industri nikel. Mulai dari hilangnya tutupan hutan, banjir, sungai, laut, hingga udara tercemar, warga kehilangan ruang produksi, serta krisis kesehatan. Bahkan ikut mereduksi tatanan sosial hingga ancaman kelangsungan hidup bagi anak dan cucu di masa mendatang. Tapi perlu diketahui, bahwa dalang dari setumpuk krisis itu berkelindan erat dengan program hilirisasi nikel yang berlanjut. Tidak menutup kemungkinan, krisis ini terus meluas menggerogoti tubuh kepulauan Maluku Utara.

**Gubernur & Wakil Gubernur Maluku Utara
Terpilih 2025 - 2030 serta Partai Pengusung**

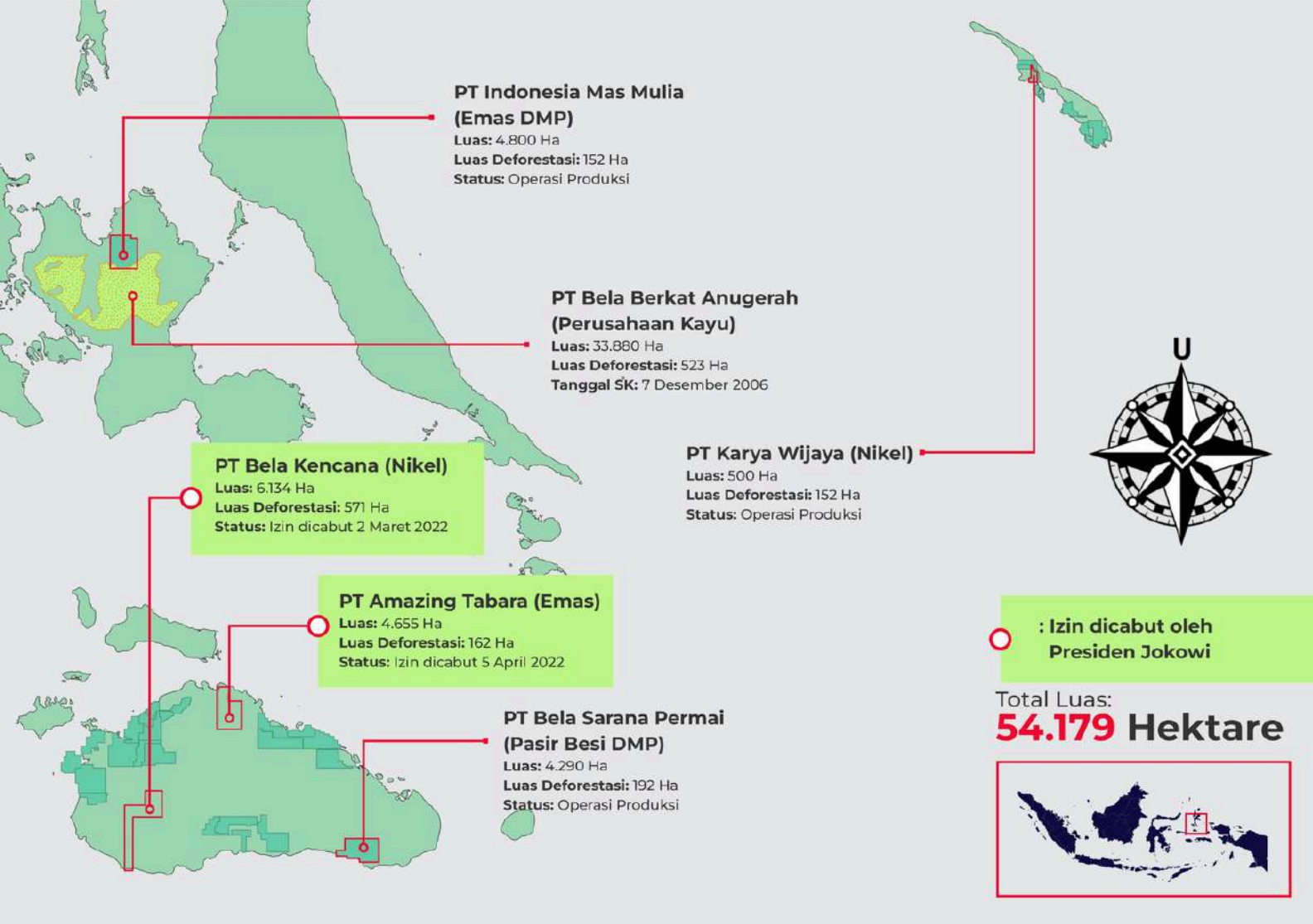


Selanjutnya, pernyataan Sherly yang mengatakan **“kami tidak hanya berbicara, tetapi juga akan bertindak dengan langkah konkret untuk merehabilitasi lingkungan Maluku Utara”**¹⁸ patut diragukan sekaligus tak bisa dipegang. Mengingat, selain partai pengusungnya menjadi suksesi kekuasaan Prabowo dan Gibran, ia juga sebenarnya adalah salah satu aktor yang berkepentingan langsung dengan sektor pertambangan serta industri ekstraktif di Maluku Utara.

Konteks politik serupa juga disinyalir terjadi di level kabupaten yang juga akan seirama dengan kepentingan pusat. Pada tiga wilayah yang menjadi arena padat industri tambang nikel pun juga dililit krisis lingkungan, dimenangkan oleh kandidat yang partainya tergabung dalam afiliasi KIM. Seperti di Halmahera Tengah suara terbanyak diraih oleh Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil dengan partai pengusung Golkar, Gerindra, Hanura, dan PBB.

Sementara di Halmahera Timur dimenangkan oleh Ubaid Yakub dan Anjas Taher yang diusung oleh Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, NasDem, PKS, PBB, PPP, PKN, dan Garuda. Sedangkan Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang diusung oleh PKS, Nasdem, dan Hanura keluar sebagai pemenang.

¹⁸ <https://www.halmaheranesia.com/2024/11/20/sherly-sarbin-soroti-kerusakan-lingkungan-di-teluk-buli-dan-teluk-weda/>



VI. Jejak Bisnis Ekstraktif Sherly Tjoanda

Sherly Tjoanda adalah istri dari Benny Laos. Benny Laos meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan saat ia berstatus sebagai kandidat calon Gubernur Maluku Utara. Sherly kemudian dipilih oleh koalisi partai untuk menggantikan suaminya dan pada akhirnya memenangkan pilkada. Sherly Tjoanda diketahui sebagai pengusaha. Jejak gurita bisnisnya bergerak di multi sektor. Mulai dari perhotelan, kontraktor atau jasa konstruksi, dan sektor industri ekstraktif.

Berkaitan dengan industri ekstraktif, penelusuran Simpul JATAM Maluku Utara menemukan setidaknya ada enam industri berbasis lahan yang terhubung langsung dengan Sherly, dengan rata-rata penguasaan saham mayoritas. Adapun perusahaan tersebut, yakni PT Indonesia Mas Mulia, PT Amazing Tabara, PT Bela Sarana Permai, PT Karya Wijaya, PT Bela Kencana, dan PT Bela Berkat Anugerah.

PT Indonesia Mas Mulia

Perusahaan ini mengantongi IUP Emas seluas 4.800 hektare dengan nomor perizinan 502/5/DPMPTSP/X/2018. Lokasinya di Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Halmahera Selatan. Pada perusahaan ini, PT Belaco mempunyai kepemilikan saham mayoritas dengan menguasai 21.250 lembar saham. Di PT Belaco, nama Benny Laos tercatat memiliki 3.000 lembar saham, mengikuti PT Bela Group yang menguasai 7.000 lembar saham. PT Bela Group adalah Perusahaan Holding dengan kepemilikan saham Sherly Tjoanda sebagai direktur menguasai 25.500 lembar saham dan Benny Laos 75.500 lembar saham.

Dalam rekam jejaknya, operasi PT Indonesia Mas Mulia ditengarai telah merampas dan merusak area perkebunan yang menjadi lahan produksi bagi warga di Desa Yaba. Lahan warga itu seluas 101 hektare yang sudah ditanami kelapa. Perusahaan juga ditengarai merusak Sungai Lele yang dipakai warga Yaba dalam memenuhi kehidupan domestik.¹⁹ Namun saat ini sungai tersebut takut dikonsumsi lagi oleh warga.²⁰

19 <https://investigasi.wartaglobal.id/2024/07/pt-imm-milik-beni-laos-diduga-merusak.html>

20 <https://investigasi.wartaglobal.id/2024/07/terombosi-lahan-warga-tanpa-kompensasi.html>

PT Amazing Tabara

Perusahaan ini mengantongi IUP Emas melalui SK Gubernur Maluku Utara Nomor 502/7/DPMPTSP/2018 seluas 4.655 hektare di Desa Sambiki, Aer Mangga, dan Anggai, Kecamatan Pulau Obi, Halmahera Selatan. Pada perusahaan ini, nama Benny Laos, suami dari Sherly Tjoanda memiliki 450 lembar saham sebagai kepemilikan mayoritas atas perusahaan.

Dalam rekam jejaknya, PT Amazing Tabara ditolak oleh warga di tiga desa tersebut. Warga khawatir, operasi perusahaan tambang emas yang berlangsung bakal berdampak buruk pada pemukiman, pemakaman umum, sekolah, perkebunan, bahkan hutan mangrove yang masuk kawasan lindung.²¹ Diduga menyalahi aturan, pada April 2022, konsesi perusahaan ini kemudian dicabut oleh Pemerintah.²²

PT Bela Sarana Permai

Perusahaan ini mengantongi IUP Pasir Besi dan mineral pengikat dengan nomor perizinan 502/6/DPMPTSP/XI/2018 seluas 4.290 hektare di Desa Woi, Kecamatan Obi Timur, Halmahera Selatan. Pada perusahaan ini nama Benny Laos tercatat mempunyai 1.960 lembar saham sebagai kepemilikan mayoritas pada perusahaan.

²¹ <https://www.mongabay.co.id/2022/01/08/ancam-pemukiman-sampai-hutan-lindung-warga-desak-pemerintah-cabut-izin-tambang-emas-di-pulau-obi/>

²² <https://halmaheraraya.id/kementerian-investasi-bkpm-resmi-cabut-izin-pt-amazing-tabara/>

Dalam rekam jejaknya, PT Bela Sarana Permai ditolak oleh warga Desa Woi. Dalam sebuah rapat terbuka antara Pemerintah Desa Woi bersama seluruh elemen lapisan masyarakat yang digelar di depan kantor desa, menyepakati menolak kehadiran perusahaan serta meminta pemerintah untuk mencabut izin konsesi perusahaan.²³

PT Karya Wijaya

Perusahaan ini mengantongi IUP Nikel dengan nomor perizinan 502/34/DPMPTSP/XII/2020 seluas 500 hektare di Tanjung Ueboelie, Pulau Gebe, Halmahera Tengah. Gebe adalah pulau mungil yang kini sudah sekarat. Kehadiran perusahaan tambang itu ditengarai turut menambah beban kerusakan lingkungan di atas pulau.²⁴

Pada perusahaan ini, nama Benny Laos tercatat memiliki 1.625 lembar saham dan Sherly Tjoanda yang menjabat sebagai Komisaris Utama memiliki 750 lembar saham. Artinya, mayoritas saham dari perusahaan ini dikuasai oleh Sherly Tjoanda dan Benny Laos.

²³ <https://www.snipers.news/2021/06/warga-desa-wooi-sepakat-menolak-pt-bela.html>

²⁴ <https://projectmultatuli.org/penghancuran-pulau-gebe-sekarat-air-dan-deforestasi-ulah-oligarki-nikel/>

PT Bela Kencana

Perusahaan ini mengantongi IUP Nikel dengan nomor perizinan 214.3/KPTS/MU/2016 seluas 6.134 hektare yang terletak di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera Selatan. Pada perusahaan ini, nama Benny Laos tercatat memiliki 2.000 lembar saham dan PT Bela Group memiliki 3.000 lembar saham. PT Bela Group adalah Perusahaan Holding dengan kepemilikan saham Sherly Tjoanda sebagai direktur menguasai 25.500 lembar saham, dan nama Benny Laos tercatat memiliki 75.500 lembar saham.

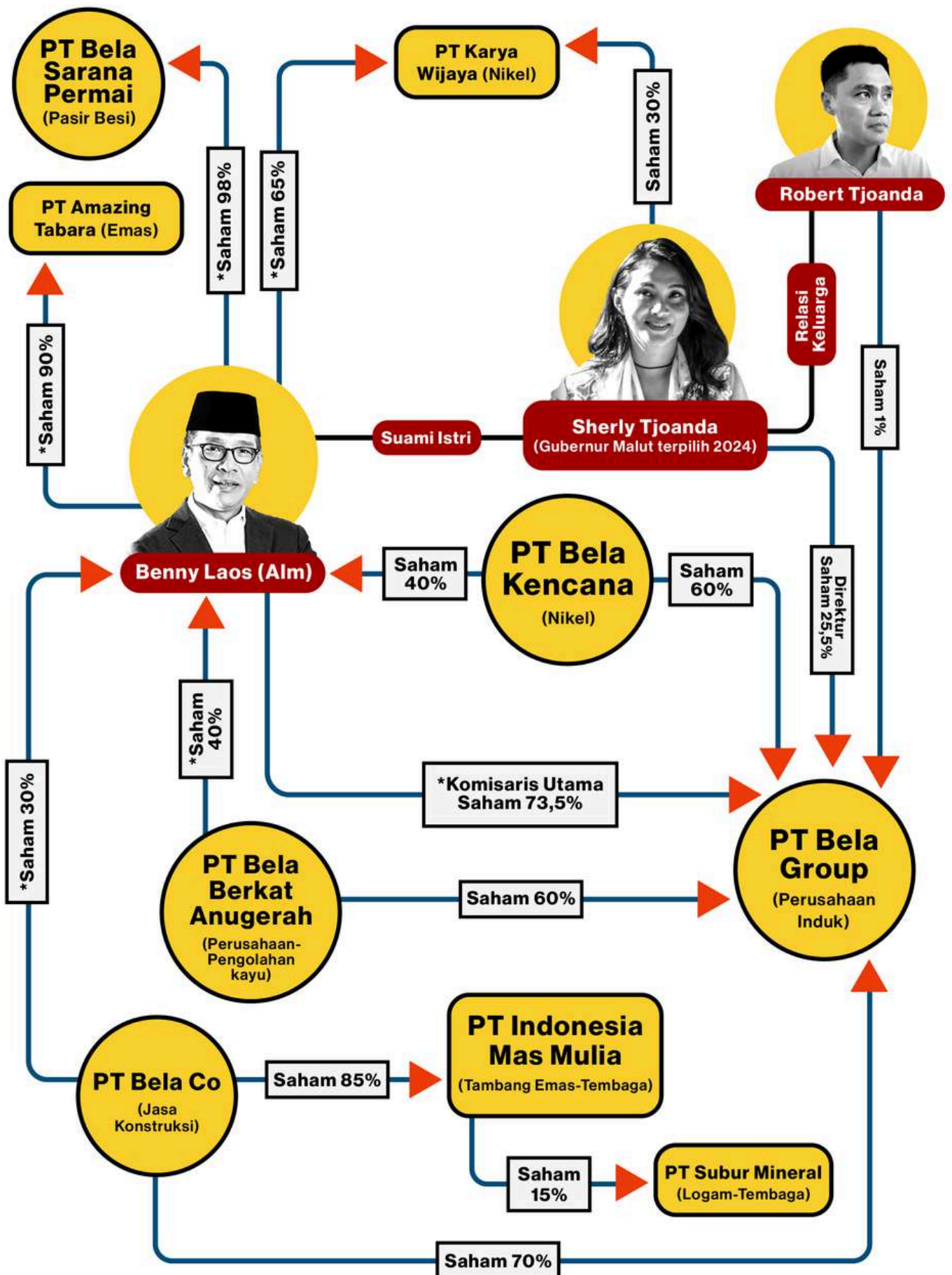
Dalam rekam jejaknya, PT Bela Kencana ditolak kehadirannya oleh warga Desa Soligi. Warga khawatir lahan kebun yang sudah ditanami cengkeh dan pala sebagai komoditas yang menjadi sumber produksi akan rusak, serta dampaknya lainnya yang ditimbulkan seiring dengan operasi tambang.²⁵ Pada Maret 2022 perusahaan ini kemudian dicabut oleh pemerintah.²⁶

PT Bela Berkat Anugerah

Perusahaan kayu bulat ini mendapatkan izin melalui Keputusan Menteri Kehutanan bernomor: SK.389/menhut-II/2006 sebagai Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan areal produksi seluas 33.880 hektare yang terletak di Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Pada perusahaan ini nama Benny Laos tercatat memiliki 8.000 lembar saham dan PT Bela Group menguasai 12.000 lembar saham.

²⁵ <https://malut.targetindo.com/2022/02/11/aksi-demo-menolak-kehadiran-pt-bela-kencana-dan-bandara-di-desa-soligi/>

²⁶ <https://www.malutsatu.com/2022/04/pemerintah-pusat-cabut-15-izin-usaha-pertambangan-di-maluku-utara/>



*Nama Benny Laos masih tercatat di dalam akta perusahaan. Ia meninggal dalam kecelakaan kapal pada 12 Oktober 2024

Kepemilikan Saham





Foto: Garry Lotulung via Mongabay

VII. Sikap Simpul JATAM Malut

- ① Terhadap kasus korupsi yang menjerat terpidana Abdul Gani Kasuba, khususnya yang menjerat pada rasuah sumber daya alam, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu untuk dimintai keterangan sekaligus mengklarifikasi nama mereka yang dikaitkan dengan dengan Blok Medan. Kami mendesak KPK untuk terus mendalami aktor-aktor lainnya di luar tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK seharusnya terus memburu seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali.
- ② Menjamurnya izin tambang pada seujur tubuh kepulauan Maluku Utara telah mendalangi sejumlah bencana sosial-ekologis yang tak terelakkan. Dengan demikian pengurus negara perlu mengevaluasi seluruh izin tambang sekaligus moratorium perizinan tambang di Maluku Utara. Selain itu terhadap wilayah yang telah mencapai kondisi krisis, kami mendesak untuk segera dilakukan pemulihan.

③ Akrobat politik hari ini, mulai dari terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara dengan latar sebagai pebisnis ekstraktif sekaligus diusung oleh partai KIM plus; terpilihnya kandidat yang diusung oleh partai yang terafiliasi dengan KIM plus di kantong utama nikel seperti Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan; serta penunjukan Bahlil Lahadalia yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dengan fokus lebih banyak mengurus sektor energi; menunjukkan pengurus negara tak benar-benar serius menghentikan laju kerusakan dan krisis ekologis yang dihadapi Maluku Utara. Dengan ambisi pemerintahan Prabowo Subianto yang menggebu-gebu untuk mengejar nilai tambah komoditas nikel, pada 2025 mendatang, Maluku Utara akan mengalami kerusakan yang lebih memilukan dibandingkan 2024 dengan eskalasi bencana yang lebih merusak.

SEBARAN TAMBANG

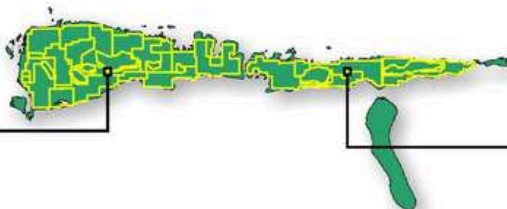
DI MALUKU UTARA

Terdapat Total **127 izin** pertambangan dengan total luas konsesi **655.581,43** ha dan **12 titik** smelter

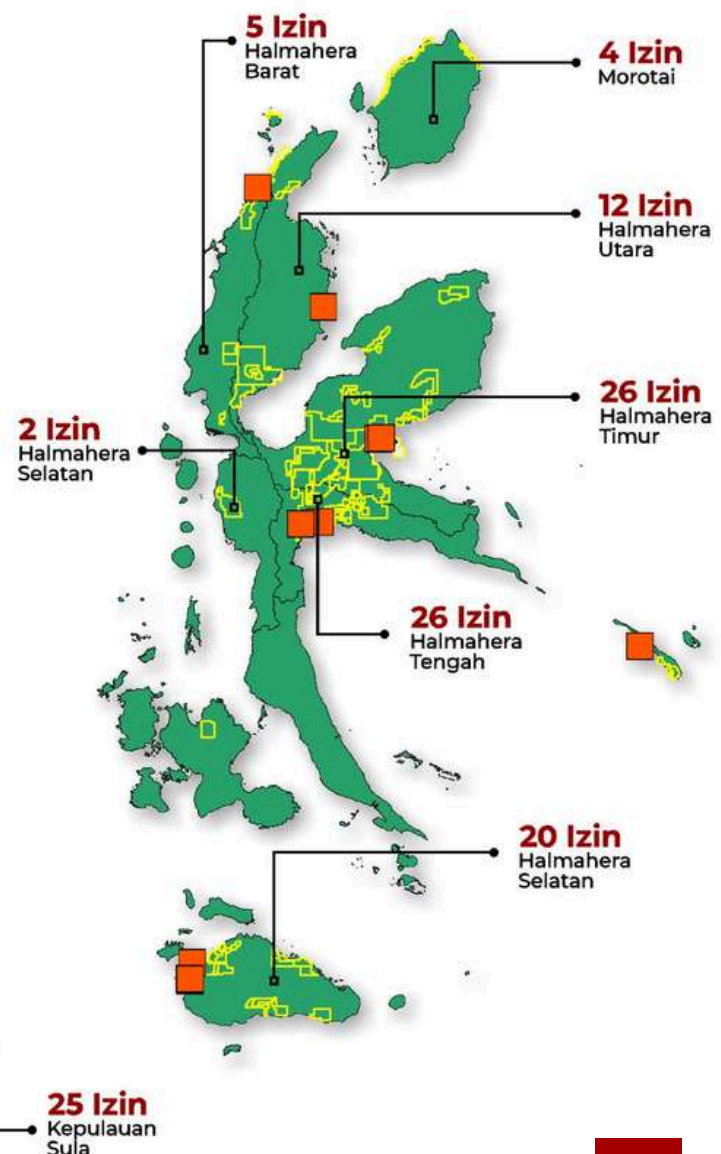
Komoditas:

- Batu Gamping **5 Izin**,
- Batu gamping untuk industri **3 Izin**,
- Batu Gunung Quarry besar **1 Izin**,
- Batu Kuarsa **1 Izin**,
- Batuan **1 Izin**,
- Besi **8 Izin**,
- Bijih Besi **26 Izin**,
- Emas **9 Izin**,
- Gobro **1 Izin**,
- Mangan **1 Izin**,
- Nikel **62 Izin**,
- Pasir besi **7 Izin**,
- Tanah diatome **1 Izin**,
- Tembaga dmp **1 Izin**.

7 Izin
Taliabu



25 Izin
Kepulauan Sula







JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK
SIMPUL MALUKU UTARA

2024

CATATAN AKHIR TAHUN 2024 & PROYEKSI 2025

BENCANA EKSTRAKTIVISME YANG TERORGANISIR DI MALUKU UTARA